

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah “*Corporate Governance*” pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee*, Inggris di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Menurut *Cadbury Committee of United Kingdom* dalam Agoes dan Ardana (2009 : 101), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah :

“A set of rules that define the relationship between shareholders, manager, creditor, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.” [“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”]

Dalam Agoes dan Ardana (2009 : 98) menyatakan bahwa tata kelola yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah asing *Good Corporate Governance* (GCG) tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat. Semua itu terjadi karena perilaku tidak etis bahkan cenderung kriminal yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang memang dimungkinkan karena kekuatan mereka yang sangat besar di satu sisi, dan tidak berdayanya aparat

pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas perilaku pelaku bisnis ini.

Kegagalan perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan dan krisis-krisis ekonomi di berbagai negara, telah memusatkan perhatian kepada pentingnya *corporate governance*. Kebijakan lembaga keuangan berskala besar dalam pendanaan perusahaan-perusahaan melalui pinjaman atau pemberian modal perusahaan, mulai memasukkan syarat-syarat pelaksanaan *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan yang didanai (Sutedi, 2011 : 4).

Tjager dkk. (2003) dalam Agoes dan Ardana (2009 : 114) mengungkapkan bahwa rendahnya kinerja BUMN ini ada kaitannya dengan belum efektifnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN tersebut.

Maka dari itu, keberadaan audit internal diharapkan dapat mengatasi skandal perusahaan dan membantu perusahaan dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG). *Internal audit* atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif (Tugiman, 1997 : 11).

Menurut Effendi (2009 : 47), sistem pengendalian internal merupakan salah satu perwujudan dari *good corporate governance* yang seharusnya dapat diimplementasikan secara konsisten di perusahaan. Tidak berjalannya fungsi dan proses pengendalian internal dalam suatu perusahaan merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai macam tindak kecurangan (*fraud*) di lingkungan perusahaan

tersebut. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal memegang peranan yang cukup penting dalam menjaga keamanan aset perusahaan dari tindakan pencurian, penyalahgunaan wewenang, maupun korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Fungsi audit internal hanya terdapat dalam perusahaan yang relatif besar. Dalam perusahaan ini, pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, bagian, seksi atau suatu organisasi yang lain dan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada kepala-kepala unit organisasi tersebut. Pendelegasian wewenang kepada sejumlah unit organisasi inilah yang mendorong perlunya dibentuk fungsi audit internal. Tugas fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian internal yang lain (Mulyadi dan Puradiredja, 1998 : 202).

Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004 : 3) menyatakan bahwa di Indonesia, pembentukan fungsi audit internal merupakan keharusan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank, dan lembaga pemerintah. Perusahaan Publik (Tbk) wajib membentuk komite audit. Agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif, komite audit juga memerlukan fungsi audit internal.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Pasal 1, Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Pasal 2 ayat 1 tentang BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah salah satu perusahaan BUMN yang wilayah kerjanya berada di Kota Bandung dan banyak pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang dikenal sebagai *stakeholder* perusahaan. PT. Dirgantara Indonesia merupakan salah satu perusahaan penerbangan di Asia yang berpengalaman dan berkompetensi dalam rancang bangun, pengembangan, dan *manufacturing* pesawat terbang. Kini, PT. Dirgantara Indonesia telah berhasil sebagai industri manufaktur dan memiliki diversifikasi produknya, tidak hanya bidang pesawat terbang, tetapi juga dalam bidang lain, seperti teknologi informasi, telekomunikasi, otomotif, maritim, militer, otomasi dan kontrol, minyak dan gas, turbin industri, teknologi simulasi, dan *engineering services*. Hal ini membuat manajemen PT. Dirgantara Indonesia menyadari pentingnya audit internal guna membantu perusahaan dalam peningkatan kinerja, penyajian laporan keuangan yang dapat diandalkan, mencegah kecurangan dan keberhasilan penerapan GCG.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Audit Internal dalam Meningkatkan Kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pelaksanaan audit internal pada PT. Dirgantara Indonesia sudah dilaksanakan dengan baik?
2. Apakah pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Dirgantara Indonesia sudah dilaksanakan dengan baik?
3. Bagaimana peranan audit internal dalam meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Dirgantara Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pelaksanaan dan kondisi audit internal pada PT. Dirgantara Indonesia.
2. Mengetahui pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Dirgantara Indonesia.
3. Untuk mengetahui peranan audit internal dalam meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Dirgantara Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian, yaitu :

1. Diharapkan dapat memberi gambaran mengenai peranan audit internal dalam meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan.
2. Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang pengauditan.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji bidang yang sama sehingga menjadikan hasil penelitian ini sebagai pembanding.

1.5 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi PT. Dirgantara Indonesia, hasil penelitian ini memberikan informasi tentang manfaat audit internal dalam meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi PT. Dirgantara Indonesia.
2. Bagi mahasiswa atau orang yang sedang melakukan penelitian, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji bidang yang sama sehingga menjadikan hasil penelitian ini sebagai pembanding.